

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN  
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN**

**Asmaria<sup>1</sup>, Erwin Putubasai<sup>2</sup>, Heri Yurizal Efendi<sup>3</sup>**

[asmariasisip@gmail.com](mailto:asmariasisip@gmail.com)<sup>1</sup>, [erwinputubasai@gmail.com](mailto:erwinputubasai@gmail.com)<sup>2</sup>,

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai<sup>1</sup>, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai<sup>2</sup>, Universitas  
Sang Bumi Ruwa Jurai<sup>3</sup>

**Abstrack**

*The existence of government assistance in the Allocation of Village Funds or often called ADD village funds for each village which is very large in number and is managed directly by villages throughout Indonesia is currently a hot topic of discussion in the country with the priority of using the budget for development and community empowerment, so it is necessary also good management of village funds by the Banjar Negeri Village Government, Way Lima District, Pesawaran This research is a qualitative research with a descriptive type of research design, which is a study that is intended to provide an overview of the Management of Village Funds in Community Empowerment in Banjar Negeri Village, Way Lima District, Pesawaran Regency. The data used in the study are primary and secondary data, obtained through observation, in-depth interviews, and documentation. From the results of this study, it can be seen that: 1. The management of village funds in empowering the people of Banjar Negeri Village, Way Lima District, Pesawaran Regency starts from activities: in the form of planning a development program that has involved all elements of the community, and prioritizes community participation. 2. Realization of development programs and community empowerment activities originating from village funds in community empowerment in Banjar Negeri Village, Way Lima District, Pesawaran Regency in the form of: Construction of road infrastructure and agricultural infrastructure, carried out by underprivileged and unemployed village community members in Banjar Negeri Village Way Lima Subdistrict, Pesawaran Regency, both as workers and experts, through the village cash labor-intensive program. 3. Efforts to Overcome Obstacles to the Management of Village Funds in Community Empowerment in Banjar Negeri Village, Way Lima District, Pesawaran Regency, the Banjar Negeri Village Apparatus, Way Lima District, Pesawaran Regency made adjustments to the program, then when the village funds were disbursed, they immediately started implementing the program.*

**Keywords: Community Empowerment / Village Fund**

## **Abstrak**

Bantuan pemerintah dalam Alokasi Dana Desa atau sering disebut ADD dana desa untuk setiap desa yang jumlahnya sangat besar dan dikelola secara langsung oleh desa se-Indonesia tersebut saat ini menjadi topik pembicaraan hangat didalam negeri dengan prioritas penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan pula pengelolaan dana desa yang baik oleh Pemerinah Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk membangun kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian tipe deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi suatu gambaran mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran . Data-data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer maupun sekunder, diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: 1. Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dimulai dari kegiatan : dalam bentuk Perencanaan program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat, dan mengedepankan partisipasi masyarakat. 2. Realisasi program pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran berupa: Pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian, yang dilakukan oleh anggota masyarakat desa yang kurang mampu dan pengangguran dalam Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran baik sebagai pekerja ataupun juga tenaga ahli, melalui adanya program padat karya tunaidesa.

**Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat / Dana Desa**

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintah Republik Indonesia secara resmi melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya disempunakan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sejak saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah di seluruh Indonesia telah memasuki masa babakan baru, yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah

yang lama sangat bersifat sentralisasi serta didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan. Sjafrizal, dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi”, (2016; 105) mengatakan bahwa: dengan dimulainya era baru tersebut maka pemerintah daerah mendapatkan wewenang serta mendapatkan sumber keuangan baru sebagai pendorong pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerahnya yang selanjutnya akan juga menjadi pendorong bagi proses pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui Pemberdayaan masyarakat adalah dengan cara memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang dalam kehidupan, mulai dari bidang pemerintahan desa, bidang organisasi dan kelembagaan desa, bidang kesehatan, bidang ekonomi masyarakat, bidang teknologi, bidang pendidikan, bidang budaya, bidang keagamaan serta bidang hukum. Namun saat ini kendala yang dialami oleh sebagian desa adalah keterbatasan keuangan desa. Dimana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) mengalami ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.

Menurut Hidayana dan FPPD (2005:2) keadaan seperti keterbatasan keuangan ini disebabkan oleh empat faktor pertama desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga, rendahnya danaoperasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi tidak dikelola oleh dinas.

Gunawan Sumodinigrat, (2009;51) mengatakan bahwa: Program pembangunan daerah dituangkan melalui berbagai bantuan pembangunan daerah dan bantuan pembangunan desa

termasuk pula dana desa. Program pembangunan daerah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, pengembangan potensi daerah, dan peningkatan kemampuan masyarakat dan Aparat di daerah. Selain itu bantuan pembangunan yang diberikan kepada daerah merupakan pemacu untuk meningkatkan potensi daerah dalam pemanfaatan seluruh potensi sumber daya untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Sejak bergulirnya dana desa tahun 2015 sampai pada tahun 2021 jumlah dana desa yang telah digelontorkan pemerintah sejumlah Rp 323 triliun. Dana ini telah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), dalam [nasional.kontan.co.id/news](http://nasional.kontan.co.id/news) Jumat, 15 Januari 2021 / 16:58 WIB mengatakan bahwa, penyaluran dana desa dalam enam tahun terakhir mencapai Rp 323 triliun. “Total dana desa yang telah tersalur sepanjang 2015-2020 sebesar Rp 323,32 triliun,” Program-program yang direncanakan dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan desa sudah seharusnya menyentuh secara langsung kepada kepentingan masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu masyarakat desa hendaknya ikut dilibatkan dalam proses pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan desa tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab dari pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama diantara pemerintah itu sendiri dan masyarakat desa.

Menurut pendapat Nancy Foy sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat dalam I. Nyoman Summaryadi, (2015;:117-118) menyebutkan ada empat unsur utama dalam pemberdayaan yang saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu: 1. pemberdayaan itu terfokuskan pada kinerja (*performance focus*). 2. (*real teams*) kinerja yang baik dari tim yang baik. 3. pemberdayaan membutuhkan (*visible leadership*) seorang pemimpin yang mempunyai visi. 4.

pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (good communication).

Pemerintah Pusat berkeinginan kuat untuk dapat mengalokasikan anggaran dana desa dengan jumlah total sebesar Rp 400 triliun untuk dapat diberikan dalam 5 tahun ke depan hingga tahun 2024. Pemerintah Pusat hingga saat ini telah menganggarkan untuk alokasi dana desa sebesar Rp 257 triliun yang telah digulirkan ke desa-desa sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Jumlah keseluruhan anggaran dana desa selama 5 tahun terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Anggaran dana desa saat ini sebesar Rp 257 triliun, yang setiap tahunnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan anggaran setiap tahunnya dapat kita lihat dengan rinciannya, Tahun 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 46,98 triliun, tahun 2017 dana desa juga mengalami kenaikan sebesar Rp 60 triliun, tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 60 triliun, dan tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 70 triliun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Bagaimanakah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran?”**

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini akan menggunakan desain *atau metode-penelitian kualitatif*. Kirk dan Miller

(Moleong, 2014:3) menyatakan bahwa yang dikatakan "penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan".

Peneliti menggunakan desain penelitian tipe deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi suatu gambaran mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Penelitian ini juga dibantu dengan data sekunder melalui dokumen-dokumen arsip dari berbagai kegiatan dari Pemerintah Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, berupa aktifitas kegiatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Pesawaran merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Pesawaran terbentuk melalui terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2007 tertanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung yang diresmikan padatanggal 2 November 2007. pengelolaan dana desa di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran termasuk kategori baik, di Kecamatan Way Lima dan Kabupaten Pesawaran dimana Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima dalam

pengelolaan dana desa termasuk paling tertib administrasi, dapat dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima disiplin dalam pengambilan pencairan dana desa dan tidak pernah telat dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban. Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima kerap kali menjadi rujukan desa-desa lain, untuk belajar dalam hal pengelolaan keuangan desa terutama dana desa.

Pengalokasian dana desa di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima terbagi dalam pembangunan fisik desa, seperti : sarana dan prasarana, jalan dan irigasi persawahan dan program dibidang pemberdayaan masyarakat seperti pembinaan dan bimbingan teknis, program padat karya tunai, kegiatan PKK dan posyadu dan pemberdayaan sosial lainnya.

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari dana desa terlihat bahwa, masyarakat aktif dalam perencanaan program. Di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima proses perencanaan dilaksanakan dengan transparan, dimulai dengan musyawarah dusun (Musdus), disana dari setiap Rukun Tetangga (RT) ada perwakilan 10 warga yang diundang, untuk mengutarakan usulan-usulan program apa yang dibutuhkan disetiap RT. Usulan –usulan program dari tingkat RT diambil usulan berdasar skala prioritas pada Musrenbang desa yang di ikuti oleh unsur masyarakat, tokoh masyarakat, LPM, BPD, Perangkat Desa, dan Camat sebagai Pembina Desa.

Selanjutnya dibuatlah rencana kerja pemerintahan (RKP) desa, RKP desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. RKP desa berisi evaluasi-evaluasi dari RKP tahun-tahun sebelumnya, prioritas

pembangunan tahun sebelumnya, kegiatan dan anggaran kegiatan tahun sebelumnya. Setelah RKP desa selesai disusun, dibuatlah rencana anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDesa). RAPBDesa diusulkan kepada Bupati melewati Camat, dan apabila disetujui pemerintahan Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima menyusun APBDDesa dan mengesahkannya. Masyarakat merasa puas dengan kegiatan perencanaan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima, sebab mereka telah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program, selain itu juga dukungan dan tanggapan yang cepat dari Pemerintahan Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima ketika ada usulan program.

## **2. Pelaksanaan**

Masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan desa, semua proyek pembangunan desa tidak dikerjakan oleh pihak ketiga atau bekerjasama dengan warga desa lain, melainkan dikerjakan sendiri oleh warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima sendiri. Pemerintah Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima memprioritaskan masyarakat kurang mampu dan pengangguran desa untuk ikut andil dalam proyek pembangunan desa, sehingga nantinya dapat menambah ketrampilan dan pendapatan mereka.

Sebagaimana disebutkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulumiyah, dkk mengenai peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa Ulumiyah dkk mengatakan bahwa, adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat didalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan, program-program pembangunan itu dapat menjadi sarana untuk mengurangi pengangguran dan dapat pula meningkatkan perekonomian masyarakat, karena masyarakat didalamnya dapat berkesempatan untuk bisa memperoleh pekerjaan. Pemerintah Desa Banjar Negeri

Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran berkomitmen dana desa haruslah bermanfaat bagi semua masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah.

Kerjasama yang baik antara perangkat desa dan masyarakat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima telah terjalin baik, dimana masyarakat aktif memberikan usulan usulan dan Pemerintah Desa sebagai pengelola dana desa merespon cepat usulan dari masyarakat.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan dana desa yang berupa pencatatan dan pembukuan dalam proses administrasi keuangan desa dengan menggunakan dokumen, buku, formulir, dan pada sistim keuangan desa (Siskeudes). Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan baik dan disiplin. Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima telah mandiri dalam penginputan data ke aplikasi Siskeudes, sehingga pemerintah Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima tidak lagi membutuhkan pembantu atau pendamping dalam pengelolaan datanya. Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima malah sering kali menjadi rujukan desa-desa lain untuk belajar dalam penatausahaan dalam penginputan data ke siskeudes.

### **4 . Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Dalam pelaporan Bendahara Desa harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Penutupan buku harus dilakukan dengan Kepala Desa, dan Kepala Desa menyampaikan kebenaran dari penggunaan dana desa kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Laporan secara nyata dari penggunaan dana desa di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima telah dilakukan dengan tertib. Pelaporan dan pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah pusat tetapi juga ada

pemberitahuan kepada masyarakat disetiap akhir tahunnya. Apa saja yang telah dapat dilaksanakan dari penggunaan dana desa tersebut di beritahukan kepada masyarakat desanya.

Seperti yang kemukakan oleh Andrian Puspawjaya (2016), dalam bukunya yang membahas mengenai Pengelolaan keuangan desa, ia memaparkan bahwa Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas keterbukaan ini adalah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima juga sudah mulai memiliki web desa disana nanti akan di unggah semua kegiatan terkait tentang desa dan pelaksanaan program dana desa juga masuk didalamnya.

Realisasi program pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran berupa: Pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian, yang dilakukan oleh anggota masyarakat desa yang kurang mampu dan pengangguran dalam Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran baik sebagai pekerja ataupun juga tenaga ahli, melalui adanya program padat karya tunai desa. Diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan Perangkat Desa. Adanya Koperasi dan UMKM. Adanya kegiatan PKK dan Posyandu. Pemberdayaan masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima itu sendiri, dilakukan baik melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fisik, maupun pemberdaayaan masyarakat dalam bentuk non fisik. Adanya pembangunan fisik dan juga non fhisik suatu desa, ini juga

merupakan penunjang dari adanya pemberdayaan masyarakat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima itu sendiri dalam Bidang Ekonomi, Bidang Hukum, Bidang Sosial, Bidang Budaya, Bidang Ekologi dan Bidang Spritual. Masyarakat berpartisipasi aktif dan ikut andil dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program dana desa. Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran memiliki sumber daya Aparatur Desa yang mumpuni dalam bidangnya, sehingga dalam mengelola tidak membutuhkan pembantu maupun pendamping. Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran memiliki sistem informasi desa yang transparan yang akan selalu di update, dari segi teknologi juga telah memadai dan telah dikuasai oleh para Perangkat Desa guna menunjang pelayanan terhadap masyarakat.

Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Perangkat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran melakukan penyesuaian program, lalu ketika dana desa sudah cair maka langsung memulai pelaksanaan program tersebut. Untuk mengatasi regulasi dan kebijakan yang sering berubah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung yang juga setiap tahun melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya Aparatur Pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M, 2014. Pemberdayaan Masyarakat di era global. Bandung: Alfabeta Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
- Amin Widjaja Tunggal. 2001. Audit Operasional (Suatu Pengantar). Jakarta :Harvarindo.
- Arif Sofianto, "Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Matra Pembaharuan*, Vol.01 No.01,2017, hal.30
- Daldjoeni, N, A. Suyitno. 2014. Pedesaan, Lingkungan Dan Pembangunan. Bandung: Alumni
- Fatchan, H.A. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama
- Friedman. (2002). Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset, Teori, dan Praktek, Edisi Kelima, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara Guba, Egon G., and Lincoln, Yvonna S. 2005. "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences." In *The Sage Handbook of Qualitative Research*, edited by Norman K. Denzin, and Yvonna S. Lincoln, 191-215. London: Sage Publication.
- Hadari, Nawawi. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hendra, Tomi. 2017. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an". *HIKMAH* Vol. 11 No. 02
- Hulu, Yamulia, et. All. 2018. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol.10 No.1
- Indarwati, Sri Mulyani. 2017. Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu
- Indarwati, Sri Mulyani. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu Jamaludin, Yanhar, et. All. 2018. "Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Social Politik UMA*, Vol.06 No.01
- Kabar Desa, Guyuran Dana Desa, dalam [www.desamodern.com](http://www.desamodern.com), diakses pada 04 April 2021, 14.00 WIB
- Kartasmita, Ginandjar. (2006). Pembangunan Untuk Rakyat. Jakarta: PT. PustakaCIDESINDO.

- Kemendesa, Presiden Ingin Dana Desa Terus Meningkatkan Setiap Tahun, dalam [www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id) diakses pada 26 Maret 2021, 21.13 WIB
- Kemendes PDPT, Presiden Joko Widodo: Realisasi Danadesa 99 Persen Itu Tinggi Sekali, dalam <https://www.kemendesa.go.id>, diakses pada 26 Maret 2021, 21.00 WIB
- Kemenkeu, Ini Hasil Dana Desa Sejak 2015, dalam [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada 24 Maret 2021, 16:50 WIB
- Kessa, Wahyudi. 2015. Buku 6, Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kemendes
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN
- Kurniawan, Borni. 2015. Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Najiati, Sri, dkk. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International – IP.2005.
- Liliana, Inten Meutia. 2017. “Pengelolaan Keuangan Dana desa”. Jurnal Akuntansi Multi Pradigma, Vol.08 No. 02,
- Mardiasmo. 2010. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset
- M.L. Jhingan. 2012. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. D. Guritno, penerjemah. Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Munandar, Aris. 2008. “Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat”. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan Vol.4 No. 01 Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UII Press. Nepiana D, 2003, Proses Pemberdayaan Masyarakat Terasing Melalui Program Penyuluhan, Bandung.
- Noor, Juliyansyah. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Kencana
- Numan. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
- Permana, Sidik. 2016 Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Depublis
- Prijono, O.S, Pranarka A.M.W. 1966. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi. Jakarta: CSIS

- Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Puspawjaya, Andrian, Julia Dwi Naritha. 2016. Pengelolaan keuangan desa. Bogor: Pusdiklatwas BPKP
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan, (2006). Desentralisasi &Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural, Jakarta: Gramediarsitas Andalas
- Saibani, A. 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Media Pustaka
- Samah, A.A., & Aref, F.2009. Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia. World Rural Observation, 1 (2) : 63-68
- Permana, Sidik. 2016 Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Depublis.
- Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta:Rajawali Pers
- Sujarweni, V.Wiratna. 2015. Akuntansi Biaya.Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sujarweni. V.Wiratna. 2015. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V.Wirata. 2015. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers
- Sutawa, Gusti Kade. 2012. issues on Bali Tourism Development and Community Empowermentto Support Sustainable Tourism Development. Economics and Finance, Volume 4. Page 41-42
- Sumodinigrat, Gunawan. 2009. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan masyarakat. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara
- Summaryadi, I Nyoman. 2015. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama
- Susilo, Adib. 2016. “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam”.FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 01 No. 02
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015.Pemberdayaan Masyarakat,Bandung: Alfabeta.
- Tresiana,Novi. 2013. Metodologi Penelitian, Universitas Lampung Press.

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa KeuanganDesa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016, tentang Tata Cara Pengalokasian , Penyaluran, Penggunaan, PemantauanDan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### **Unduhan**

<http://banjarnegeri.desa.id/index.php/siteman>. Sistem informasi desa diakses pada 24 April 2021, pkl. 21.00 WIB

[https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan- masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-des](https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-des)